

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TERJADINYA *FRAUD* PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
KOTA BANDAR LAMPUNG: PERSEPSI PEGAWAI
PEMERINTAHAN**

TESIS

Oleh:

Deviana Sari



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA *FRAUD* PADA SEKTOR PEMERINTAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG: PERSEPSI PEGAWAI PEMERINTAHAN

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan bukti empiris bahwa faktor-faktor kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, penegakan hukum, perilaku tidak etis, asimetri informasi dan kultur organisasi berpengaruh terhadap *Fraud* di sektor pemerintahan. Data dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai dan pejabat yang berada di bagian tatausahakeuangan yang meliputi pengelolaan anggaran, pengadaan, bendahara, pengelolaan aset dan pelaporan di Pemerintah kota Bandar Lampung. Penelitian ini akan menggunakan skala Likert 1-5, yang akan diujikan dengan menggunakan uji instrumentyal dan uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelum angket disebar dilakukan *Pilot test* terlebih dahulu untuk menyesuaikan kesesuaian angket terhadap sampel.

Pengujian hipotesis menggunakan analisis full model *Struktural Equation Modeling* (SEM) dengan *smartpls* versi 5.0. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*, keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*, penegakan hukum berpengaruh positif terhadap *fraud*, perilaku tidak etis berpengaruh negatif terhadap *fraud*, asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap *fraud* dan kultur organisasi berpengaruh positif terhadap *fraud*.

Kata Kunci : kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, penegakan hukum, perilaku tidak etis, asimetri informasi, kultur organisasi dan *fraud diamond theory*.

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE OCCURRENCE OF FRAUD IN THE GOVERNMENT SECTOR IN BANDAR LAMPUNG: PERCEPTIONS OF GOVERNMENT EMPLOYEES

Abstract

The purpose of this study was to provide empirical evidence that compensation suitability factors, the effectiveness of internal control systems, law enforcement, unethical behavior, the asymmetry of information and the organization's culture influence on Fraud in the government sector. The data in this study is the work units Government of Bandar Lampung. The sample in this study are employees and officials who are in financial administration section which includes budget management, procurement, treasurers, asset management and reporting in Bandar Lampung. This study will use a Likert scale of 1-5, which will be tested by using the instrument test the validity and reliability test. Before the questionnaire distributed conducted pilot test in advance to adjust suitability questionnaire to the sample. Hypothesis testing using a full model analysis Structural Equation Modeling (SEM) with smartpls version 5.0. The test results showed that the compensation does not affect the suitability of fraud, the effectiveness of internal control systems negatively affect fraud, law enforcement positive effect on fraud, unethical behavior negatively affect fraud, infromasi asymmetry does not affect the organization's fraud and culture positive effect on fraud.

Keywords: compensation, the effectiveness of internal control systems, law enforcement, unethical behavior, the asymmetry of information, organizational culture and fraud diamond theory

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TERJADINYA *FRAUD* PADA SEKTOR PEMERINTAHAN
KOTA BANDAR LAMPUNG: PERSEPSI PEGAWAI
PEMERINTAHAN**

Oleh:

Deviana Sari

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapat Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Tesis : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI TERJADINYA FRAUD PADA
SEKTOR PEMERINTAHAN KOTA BANDAR
LAMPUNG: PERSEPSI PEGAWAI
PEMERINTAHAN**

Nama Mahasiswa : **Deviana Sari**

No. Pokok Mahasiswa : 1421031005

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

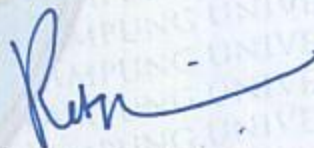


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19710802 199512 2 001



Retno Yuni Nur S., S.E., M.Sc., Akt.
NIP 19780603 200604 2 001

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi



Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D., Akt.
NIP 19691008 199512 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

Ketua : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.

Sekretaris : Retno Yuni Nur S., S.E., M.Sc., Akt.

Penguji Utama : Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D., Akt.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : 27 Juli 2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini murni, rumusan, dan penelitian saya sendiri dengan arahan pembimbing.
2. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkannya nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakberesan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai norma yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2016



Deviana Sari
1421031005

RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 18 Maret 1989 dengan nama lengkap Deviana Sari.

Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, Putri Sulung dari pasangan Bapak Nurdin dan Ibu Muslika.

Pendidikan formal yang diselesaikan penulis yaitu:

1. SD Negeri 4 Pesawaran diselesaikan pada tahun 2001
2. SMP Budaya Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2004
3. SMK Negeri 4 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2007
4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung diselesaikan pada tahun 2013

Pada tahun 2008, penulis diterima dan diakui sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung. Pada bulan Maret 2011 penulis diberikan kesempatan Magang sebagai Front Office di STIE Lampung dan diangkat menjadi karyawan tetap November 2011 sebagai Staff SPMI (Satuan Penjaminan Mutu Internal), bersamaan dengan jalannya studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung dan lulus menyelesaikan masa studi pada tahun 2013.

Penulis melanjutkan ke jenjang Pascasarjana Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun Ajaran 2014/2015, dan menyelesaikannya pada tahun ajaran 2015/2016. Saat ini penulis tercatat sebagai Dosen pada Program Studi D3 Akuntansi di STIE Prasetiya Mandiri Lampung

MOTTO

Untuk Hidup, Seseorang Harus Memimpikan Sesuatu
(Margaret Deland)

**Tak ada rahasia untuk menggapai sukses, Sukses itu dapat terjadi karena
persiapan kerja keras dan mau belajar dari kegagalan**
(Mario Teguh)

People who have a dream is the one that continues to grow in life
(Mario Teguh)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, atas izin dan ridha-Nyalah karya sederhana ini ananda persembahkan kepada :

Kedua orang tuaku, Ibuku tercinta Muslika yang telah berjuang sedemikian besar untuk hidupku sampai sejauh ini, hal besar apapun yang ananda berikan belum bisa membalas kasih sayang Ibu dan terima kasih Untuk Bapak tercinta Nurdin yang memiliki andil besar merawatku hingga aku menjadi sosok wanita dewasa seperti sekarang ini, Terima kasih dan rasa syukur yang tak pernah pupus bersamaan dengan kasih sayangku untuk Bapak dan Ibu,

I LOVE YOU.

Si Bungsu, Mela Fersiana yang telah memberi warna dan kisah terindah dengan segala kelucuanmu sehingga membuatku terus belajar menjadi sosok ibu yang harus memperhatikan segala tingkahmu, kisah ini yang membawaku untuk menjadi lebih baik karena kau bagai sebuah buku yang harus terus kupelajari, thanks a lot my Sister.

Sahabat-sahabatku "Broder and Sista",
Thankz A lot for all.. Tanpa kalian dan semangat dari kalian aku tidak akan
menjadi sekuat dan setegar saat ini, semua telah kita
jalani bersama-sama suka duka semua satu dan kita dilahirkan untuk menjadi
insan-insan yang sukses, ini keikhlasan do'aku untuk kita, Amin...

Para pendidikkmu yang ku hormati,
Terima kasih untuk seluruh ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan, terima
kasih telah mendidik ananda dengan kesabaran, terima kasih telah membantu
ananda menjadi manusia yang lebih baik dan senantiasa memberikan pelajaran
yang teramat berharga.

Almamater tercinta, Universitas Lampung
Terima Kasih untuk kesempatan terhebat yang pernah kudapatkan.

I LOVE YOU ALL

KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirobbilalamin segala puji hanya bagi ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* pada sektor Pemerintahan kota Bandar Lampung: Persepsi Pegawai Pemerintahan” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Akuntansi (M.S.Ak) pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulisan tesis ini, tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi dan saran yang diberikan dari semua pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Ibu Susi Sarumpaet, S.E.,M.B.A.,Ph.D., Akt selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung dan juga selaku Pembahas I yang telah memberikan motivasi, arahan dan waktunya selama masa perkuliahan dan masa penyusunan tesis.
4. Bapak Drs. A. Zubaidi Indra, M.M., C.P.A., Akt selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan, saran dan waktunya selama penyusunan tesis.
5. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E.,M.Si.,Akt selaku Pembimbing Utama yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, saran, dan waktunya selama penyusunan tesis.
6. Ibu Retno Yuni Nur S, S.E.,M.Sc.,Akt selaku Pembimbing Pendamping yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan, arahan dan meluangkan

waktunya selama penyusunan tesis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik.

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Terima kasih untuk rekan-rekan di SKPD se-Kota Bandar Lampung yang sudah berkontribusi dalam pengisian kuesioner dan membantu dalam memperoleh data serta mempermudah dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Ibu dan Bapak yang kucintai dan kusayangi melebihi apapun terima kasih untuk dukungan yang diberikan, untuk seluruh kasih sayang dan do'a yang tak pernah sirna dalam perjalanan hidup Devi, sehingga Devi mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.
10. Si Bungsu Mela Fersiana yang super bandel, terima kasih ya sayang sudah menjadi adikku satu-satunya yang memberikan warna dalam hidup yayuk dan menjadikan yayuk manusia yang kuat.
11. Untuk seseorang yang sekarang telah menjadi "Suamiku", terima kasih *honey* yang tiada henti memberikan semangat dan dengan sabar terus mendukung jalanku menuju cita-citaku. *Love You Achamd Kiki Apriadi*
12. Untuk Adik iparku dan mb Nyimas terima kasih sudah sangat membantuku dalam penyebaran kuesioner dan memperoleh data dengan baik.
13. Untuk seluruh keluarga besarku yang sudah memberikan dukungan selama menempuh masa pendidikan.
14. Sahabat-sahabatku tercinta: Ni Putu Elly Kusuma Aryani,S.Pd, Deden Permana, Doni Setiawan, dan Dwi Martono terima kasih selalu memberikan canda dan tawa serta memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
15. Sahabat-sahabat terbaikku di Magister Ilmu Akuntansi angkatan 2014: Mas Ade, Bambang, Daniel, Niar, Refy, Melati, Amoy, Umar, Jerry, Mb Lella, dan Mb Luke, terima kasih selalu kompak dan menjadi tempat diskusi selama menempuh masa pendidikan. Semangat teman-teman!!!
16. Untuk Mb Henny yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, Mb Linda yang sudah membantu dalam olah data, Pak Ely yang sudah menjadi kawan

diskusi selama penyelesaian tesis dan Mb Juwe serta Mb Dewi yang dengan ujian selama menyelesaikan tesis. Terima kasih dukungan dan bantuannya.

17. Mas Andri, Mb Leni dan Mb Tina serta segenap civitas akademika Program Studi Magister Ilmu Akuntansi yang turut membantu dalam kelancaran perkuliahan dan membantu dalam penyelesaian tesis.
18. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan dan dukungan dari semua pihak yang saya sebutkan maupun yang tidak saya sebutkan satu persatu akan menjadi berkah dan senantiasa ditambahkan rahmat serta nikmat oleh Allah SWT sehingga menjadi kebaikan untuk kita semua. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Juli 2016

Penulis

Deviana Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
RIWAYAT HIDUP.....	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan Penelitian.....	9
1.4.Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 The Fraud Diamond Theory	10
2.2 <i>Fraud</i>	12
2.2.1 Kesesuaian Kompensasi	14
2.2.2 Keefektifan Sistem Pengendalian Internal.....	15
2.2.3 Penegakan Hukum	16

2.2.4	Perilaku Tidak Etis.....	18
2.2.5	Asimetri Informasi	19
2.2.6	Kultur Organisasi.....	20
2.3	Rerangka Pemikiran.....	21
2.4	Pengembangan Hipotesis dan Penelitian	22
2.4.1	Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap <i>Fraud</i>	22
2.4.2	Keefektifan Sistem Pengendalian Internal terhadap <i>Fraud</i>	23
2.4.3	Penegakan Hukum terhadap <i>Fraud</i>	24
2.4.4	Perilaku Tidak Etis terhadap <i>Fraud</i>	24
2.4.5	Asimetri Informasi terhadap <i>Fraud</i>	25
2.4.6	Kultur Organisasi terhadap <i>Fraud</i>	26
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	27
3.2	Sampel	27
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	28
3.4	Variabel Penelitian.....	31
3.4.1	Variabel Dependen	31
3.4.2	Variabel Independen	31
3.5	Pengukuran Variabel	31
3.6	Instrumen Penelitian	33
3.7	Metode Analisis Data	34
BAB IV PEMBAHASAN		
4.1	Demografi Responden	35
4.2	Deskripsi Statistik.....	37
4.3	Analisis Data.....	44
4.3.1	Model Pengukuran Data	44
4.3.1.1	Uji Validitas	44
4.3.1.1.1	Uji Validitas Konvergen	45
4.3.1.1.2	Uji Validitas Diskriminan.....	46
4.3.1.2	Uji Reliabilitas.....	47
4.3.2	Pengukuran Model Struktur.....	48
4.3.2.1	<i>Coefficient Determinant</i> (R^2)	49
4.3.2.2	<i>Path Coefficient</i> ()	49
4.3.3	Uji Hipotesis	50
4.3.3.1	Hasil Hipotesis 1	51

4.3.3.2 Hasil Hipotesis 2	52
4.3.3.3 Hasil Hipotesis 3	53
4.3.3.4 Hasil Hipotesis 4	53
4.3.3.5 Hasil Hipotesis 5	54
4.3.3.6 Hasil Hipotesis 6	55

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	56
5.2 Implikasi	56
5.3 Keterbatasan dan Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

1. Daftar Tingkat Kasus Korupsi di Indonesia.....	2
2. Daftar Opini Audit Prov. Lampung	3
3. Daftar Kasus <i>Fraud</i> di Bandar Lampung.....	4
4. Daftar Penyebaran Kuesioner	29
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	30
6. Daftar Ukuran Variabel dan Indikatornya.....	32
7. Demografi Responden.....	35
8. Daftar Jawaban Responden X1	37
9. Daftar Persentase Jawaban Responden X1	37
10. Daftar Jawaban Responden X2	38
11. Daftar Persentase Jawaban Responden X2	38
12. Daftar Jawaban Responden X3	39
13. Daftar Persentase Jawaban Responden X3	39
14. Daftar Jawaban Responden X4	40
15. Daftar Persentase Jawaban Responden X4	40
16. Daftar Jawaban Responden X5	41
17. Daftar Persentase Jawaban Responden X5	41
18. Daftar Jawaban Responden X6	42
19. Daftar Persentase Jawaban Responden X6	42
20. Daftar Jawaban Responden Y	43
21. Daftar Persentase Jawaban Responden Y	43
22. Parameter Model Pengukuran Data Menggunakan <i>Partial Least Square</i> (PLS).....	44
23. Hasil Uji Validitas Konvergen	45
24. Hasil Uji Reliabilitas dengan <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability Criteria</i>	48
25. Hipotesis.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema <i>Fraud Diamond Theory</i>	10
2. Rerangka Pemikiran Teoretis.....	21
3. <i>Loading Factor PLS</i>	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Lembar Kuesioner
2. Tabulasi Hasil Kuesioner
3. Hasil Uji Validitas Konvergen
4. Hasil Uji Validitas Diskriminan dengan *Cross Loading*
5. Hasil Uji Reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability Criteria*
6. Uji *Coefficient Determinant* (R^2)
7. Hasil Uji *Path Coefficient*
8. *T-Statistics*
9. T-Tabel
10. Penelitian Terdahulu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak kasus *fraud* yang menyentuh berbagai bidang kehidupan diseluruh wilayah pemerintahan negara menurut reformasi sistem perekonomian dan pemerintahan terutama birokrasinya, diantaranya yakni kasus korupsi Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan bendaharanya pada tahun 2013 terkait dugaan pidana korupsi dana kematian. Sebanyak 470 surat keterangan kematian dipalsukan dalam kasus tersebut dan kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2.26 miliar. Pemerintah memiliki tujuan yang bukan hanya pada memperoleh opini wajar atas laporan keuangan yang dihasilkan, melainkan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara, namun dengan adanya *fraud* hal tersebut menjadi terkendala. *Fraud* yang bersifat lembaga lebih kompleks dibandingkan dengan kecurangan yang dilakukan oleh pribadi, *fraud* mengakibatkan kerugian yang besar. Dalam pemerintahan, kerugian yang diterima bukan hanya kehilangan atau kerugian uang negara, namun juga berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menurunnya tingkat investasi (*Indonesia Corruption Watch*).

Menurut Albrecht et al. (2009:7):

“Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it includes surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery”.

Dapat diartikan sebagai istilah generik dan mencakup semua sarana dengan berbagai kecerdikan manusia yang dapat dirancang oleh satu individu untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan keterangan palsu.

Menurut Sawyer (2006:339), *fraud* adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja, *fraud* merupakan suatu tindakan penyimpangan yang disengaja oleh individu atau kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok. Kasus kecurangan yang sering terjadi didalam instansi pemerintahan maupun swasta adalah kasus korupsi. Kasus korupsi tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga melibatkan orang-orang yang dibawahnya. Tindakan korupsi yang seringkali dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen dan *mark up* yang dapat merugikan keuangan negara dan hal ini biasanya dipicu oleh adanya keinginan untuk menampilkan atau menyajikan laporan keuangan yang surplus (IAI:2001).

Tabel 1. Daftar Tingkat Kasus Korupsi di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2011	402 kasus
2	2012	436 kasus
3	2013	560 kasus

4	2014	629 kasus
---	------	-----------

Sumber : *Indonesia Corruption Watch*

Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi selama semester I dan II pada tahun 2014, sebagian besar tersangka adalah pejabat/pegawai pemerintah daerah (pemda) dan kementerian yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp5,29 triliun.

Tersangka lain merupakan direktur/komisaris perusahaan swasta, anggota DPR/DPRD, kepala dinas, dan kepala daerah. Peningkatan jumlah tersangka yang paling signifikan terjadi pada jabatan kepala daerah. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat bahwa kasus korupsi atupun *fraud* tidak hanya terjadi di pemerintah pusat namun juga terjadi di pemerintah daerah. Dalam beberapa tahun terakhir laporan keuangan yang disajikan khususnya di kota dan kabupaten Provinsi Lampung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti data yang ditunjukkan pada Tabel 2 yakni daftar opini audit, dan hal ini bertolak belakang dengan data *infokorupsi.com* yang menunjukkan kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Lampung Tabel 3.

Tabel 2. Daftar Opini Audit Prov. Lampung

No	Opini Audit	Tahun	Provinsi/Kota/ Kabupaten	Ada/Tidak Ada	Kasus
1	Wajar Tanpa Pengecualian	2013	- Kota Bandar Lampung	✓	37
			- Kota Metro	✓	4
			- Kabupaten Waykanan	✓	3
			- Kabupaten Lampung Barat	X	
			- Kabupaten Tulangbawang Batar	X	
2	Wajar Dengan Pengecualian	2013	- Provinsi Lampung	✓	27
			- Kabupaten Lampung Selatan	✓	14

			- Kabupaten Lampung Tengah	✓	29
			- Kabupaten Lampung Timur	✓	41
			- Kabupaten Mesuji	X	
			- Kabupaten Pesawaran	✓	6
			- Kabupaten Pringsewu	✓	1
			- Kabupaten Tanggamus	✓	9
			- Kabupaten Tulangbawang	✓	19
3	Tidak Wajar	2013	- Kabupaten Lampung Utara	✓	13

Sumber : www.bandarlampung.bpk.go.id dan www.infokorupsi.com

Tabel 3. Daftar Kasus *Fraud* di Bandar Lampung

No	Keterangan
1	Beberapa kasus korupsi yang terjadi adalah Kasus Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan bendaharanya pada tahun 2013 terkait dugaan pidana korupsi dana kematian. Sebanyak 470 surat keterangan kematian dipalsukan dalam kasus tersebut dan kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2.26 miliar.
2	Kasus selanjutnya Koperasi Al Ikhlas Kementerian Agama Bandarlampung tahun 2011, menyebabkan kerugian negara sekitar Rp10 miliar, terpidana Duly Fitriyah, mantan Bendahara Koperasi Al-Ikhlas Kantor Departemen Agama Kota Bandarlampung, di bui. Yang memberikan fasilitas kredit dengan cara memalsukan data pemohon pinjaman dan memasukan data bahwa setiap anggota mengajukan dalam pinjaman namun anggota tersebut tidak pernah mengajukan kredit pada tahun

3	Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kota Bandar Lampung Sauki Shobier, akan menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (8/12/2011). Sauki menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana pembangunan infrastruktur dinas PU Kota Bandar Lampung tahun 2008 senilai Rp8,5 miliar. Jaksa menjerat Sauki dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.
4	Serta kasus Kepolisian Resort Kota (polresta) Bandar Lampung, masih mengusut dugaan korupsi proyek di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kotaBandar Lampung, senilai Rp4,5 miliar. Penyidik masih menunggu laporan kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Proyek di DKP tahun 2012 senilai Rp4,5 miliar, terdiri dari tiga bagian yakni, pembangunan kios mini dengan nilai proyek Rp1,5 miliar, pembangunan dermaga Rp1,5 miliar, dan pengadaan kapal Rp1,5 miliar. Sehingga, jumlah nilai proyek mencapai Rp4,5 miliar

Sumber : *infokorupsi.com*

IAI 2001 menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap asset. *Fraud* juga merupakan suatu tindakan ketika seseorang mengambil secara sengaja manfaat untuk memperkaya diri sendiri secara tidak jujur atas orang lain atau tindakan memanipulasi data keuangan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Menurut Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Abdullahi dan Mansor (2015), bahwa hal tersebut didasari oleh adanya *Fraud Diamond Theory* di dalamnya terdapat *Opportuniy* (kesempatan)

merupakan suatu kondisi yang dapat membuka peluang terjadinya kecurangan, *Incentive* (insentif) merupakan faktor yang berasal dari kondisi kebutuhan individu yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, *rationalization* (rasionalisasi) merupakan sikap atau proses berfikir dengan pertimbangan moral dari individu karyawan untuk merasionalkan tindak kecurangan dan yang terakhir *Capability* (Kemampuan) merupakan ketika seseorang memiliki komponen kemampuan yakni posisi, kecerdasan, ego dan tingkat stres untuk melakukan tindak kecurangan.

Kegagalan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dapat diakibatkan oleh beberapa hal antara lain kesesuaian Kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, penegakan hukum, perilaku tidak etis, asimetri informasi dan kultur organisasi merupakan faktor-faktor yang mengidentifikasi terjadinya kecurangan akuntansi terutama di pemerintahan. Jika hal tersebut dapat dideteksi lebih awal dan diberikan tindak pencegahan maka kecurangan akuntansi akan dapat di minimalisir sehingga terwujudnya *Good Governance* yang benar-benar diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat yakni terbentuknya kinerja pemerintahan yang baik sehingga Indonesia khususnya Bandar Lampung dapat berkembang serta dapat berkontribusi pada perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi.

Adapun beberapa penelitian yang membahas mengenai *fraud* di Sektor Pemerintahan. Zulkarnain (2013) pada Dinas Kota Surakarta menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan dan sistem pengendalian

internal dengan *fraud* di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara kultur organisasi dan penegakan hukum terhadap *fraud*, terdapat pengaruh positif perilaku tidak etis terhadap *fraud*. Sementara menurut Najahningrum (2013) yang melakukan penelitian di Dinas Provinsi DIY mengatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedur, dan komitmen organisasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara budaya etis organisasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Sementara Mustikasari (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis manajemen, dan komitmen organisasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara keadilan prosedural dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wilopo (2006) menyatakan bahwa kompensasi yang sesuai yang diberikan perusahaan ternyata tidak menurunkan perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi, hal ini bertentangan antara hipotesis serta teori dan hasil penelitian sebelumnya. Wilopo (2006) juga membuktikan dan mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diturunkan dengan cara meningkatkan keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen serta menghilangkan asimetri informasi. Sehingga dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa *fraud*

dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, penegakan hukum, budaya etis, asimetri informasi dan kultur organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disampaikan bahwa penelitian yang sudah dilaksanakan memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wilopo, 2006 yakni pada variabel perilaku tidak etis, dalam penelitian Wilopo 2006 variabel perilaku tidak etis menjadi variabel moderasi untuk mendeteksi kecenderungan kecurangan akuntansi. Sampel, tahun dan waktu penelitian juga menjadi perbedaan dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas serta dirasa masih kurangnya penelitian dan teori tentang *fraud* di sektor pemerintahan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *Fraud* pada Sektor Pemerintahan Kota Bandar Lampung: Persepsi Pegawai Pemerintahan” dan dengan adanya penelitian ini diharapkan menghasilkan output/luaran yakni mengenai *fraud* di sektor pemerintahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan penulis menyimpulkan bahwa rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Apakah kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap *fraud*?
- b. Apakah keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud*?

- c. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap *Fraud*?
- d. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap *Fraud*?
- e. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap *Fraud*?
- f. Apakah kultur organisasi berpengaruh terhadap *Fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan bukti empiris bahwa faktor-faktor kesesuaian Kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, penegakan hukum, perilaku tidak etis, asimetri informasi dan kultur organisasi berpengaruh terhadap *Fraud* di sektor pemerintahan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi akademisi adalah untuk menambah literatur mengenai fraud di sektor pemerintahan dan memiliki kontribusi untuk referensi penelitian selanjutnya
- b. Bagi pemerintahan khususnya kota Bandar Lampung adalah untuk memberikan kontribusi agar pemerintah dapat mendeteksi dan melakukan tindak pencegahan lebih dini untuk meminimalisir kasus *fraud* agar dapat terwujudnya tujuan pemerintah yakni berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

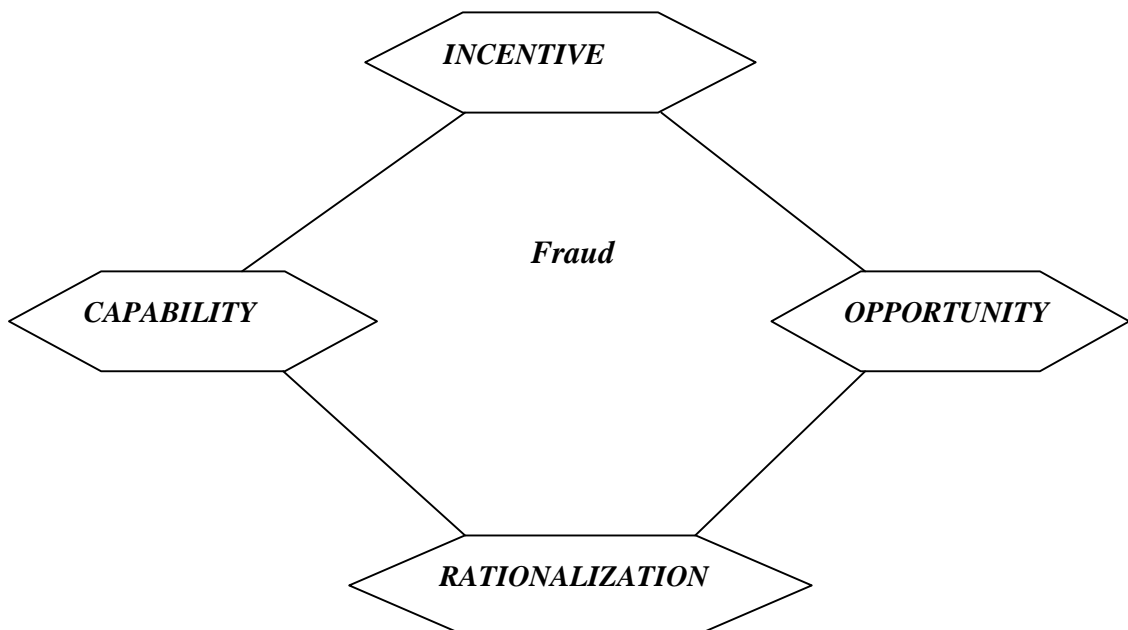
BAB II TINJAUAN TEORETIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *The Fraud Diamond Theory*

Teori *Fraud Diamond* merupakan teori yang menjadi dasar atau latar belakang untuk seseorang dalam melakukan kecurangan yang disajikan pertama kali oleh Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Abdullahi dan Mansor (2015). Dalam *Fraud Diamond* menambahkan komponen *Capability*/kemampuan setelah 3 komponen yang terdapat dalam *Fraud triangle Theory* yang dikemukakan oleh Cressey (1973), yaitu *rationalization*, *pressure*, dan *opportunity*.

Gambar 1. Skema *Fraud Diamond Theory*



Kecurangan dilakukan karena adanya *Razionalization*/rasionalisasi yang dilakukan seseorang, alasannya beragam namun pembenaran akan selalu ada.

Rasionalisasi dilakukan melalui keputusan yang dibuat secara sadar ketika pelaku kecurangan menempatkan kepentingannya di atas kepentingan orang lain.

Incentive/insentif yang dikaitkan dengan *pressure*/tekanan dapat terjadi dari dalam organisasi maupun kebutuhan individu yang secara personal dianggap lebih penting dari kebutuhan organisasi dan alasan untuk melakukan kecurangan seringkali dipicu melalui tekanan yang mempengaruhi individu.

Opportunity/Kesempatan yakni ketika kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan. Jabatan, tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk terlaksananya kecurangan. Satu-satunya faktor penyebab kecurangan yang dapat dikendalikan adalah *opportunity*. Seseorang yang karena tekanan atau rasionalisasi mungkin akan melakukan kecurangan jika ada kesempatan. Kemungkinan melakukan kecurangan akan semakin kecil jika tidak ada kesempatan. Perangkat yang dapat digunakan untuk memperkecil terjadinya kesempatan untuk melakukan kecurangan adalah dengan mengimplementasikan pengendalian internal yang memadai. Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Abdullahi dan Mansor (2015) berpendapat bahwa meskipun tekanan berdampingan dengan kesempatan dan rasionalisasi, tidak mungkin untuk melakukan tindak kecurangan kecuali komponen keempat yakni *Capability*/kemampuan dengan komponen yakni posisi, kecerdasan, ego dan tingkat stres merupakan dasar seseorang melakukan tindak kecurangan. Dengan

kata lain, potensi pelaku harus memiliki keterampilan dan kemampuan untuk melakukan *Fraud*.

2.2 Fraud

Skema kecurangan berbentuk skenario bagaimana kecurangan bisa terjadi dalam organisasi dan penjabaran metode yang biasa digunakan untuk menyembunyikan kecurangan. Pelaku kecurangan dalam organisasi bisa dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan aset, maupun pelaporan keuangan. Kecurangan tersebut dilakukan dalam kaitannya dengan jabatan seseorang yang dengan sengaja salah menggunakan maupun salah mengaplikasikan sumberdaya atau aset perusahaan (ACFE, 2006: 1.302) dalam Wilopo (2006).

Ikatan Akuntansi Indonesia (2001:316.2) menyatakan bahwa ada dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor tentang kecurangan dalam audit atas laporan keuangan, yaitu salah saji yang timbul sebagai akibat dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan kecurangan yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset, yang pertama adalah salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan, representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi atau informasi yang signifikan, salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan. Yang kedua adalah salah saji yang timbul dari perlakuan tidak

semestinya terhadap aset (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aset entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

Perlakuan tidak semestinya terhadap aset entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar harga barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aset dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan atau pihak ketiga.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan *fraud* dalam tiga kelompok berdasarkan perbuatan yakni penyimpangan aset (*Asset Misappropriation*) merupakan penyalahgunaan aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung. Yang kedua adalah pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*) tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*. Yang ketiga adalah korupsi (*Corruption*) merupakan jenis *fraud* ini yang paling

sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. Fraud jenis ini yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan.

2.2.1 Kesesuaian Kompensasi

Hasibuan (2002) mengatakan kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial (*financial reward*) yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Leopold (2000) dalam Thoyibatun (2009) mengatakan bahwa kompensasi merupakan komponen biaya yang dibayarkan oleh organisasi pada karyawan. Bagi karyawan kompensasi merupakan faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan, sedang bagi organisasi kompensasi merupakan komponen biaya yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan profitabilitas. Oleh karena itu, organisasi perlu hati-hati dalam mengontrol dan mendesain kompensasi supaya kedua kepentingan tersebut dapat diakomodasi. Hal tersebut merupakan tantangan bagi organisasi untuk membuat sistem kompensasi yang mampu mendorong karyawan berprestasi secara optimal. Salah satu tujuan pemberian kompensasi yang sesuai adalah menghargai prestasi kerja yang sudah dilakukan untuk perkembangan organisasi sehingga akan memiliki istilah *take and give* artinya ketika tanggungjawab sudah diselesaikan maka karyawan akan memperoleh hak yang seharusnya.

Beberapa terminologi dalam kompensasi : yang pertama adalah **Upah/gaji**. Upah (*wages*) biasanya berhubungan dengan tarif gaji perjam (semakin lama kerjanya, semakin besar bayarannya). Upah merupakan basis bayaran yang kerap digunakan

bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Sedangkan gaji (*salary*) umumnya berlaku untuk tarif mingguan, bulanan atau tahunan. Yang kedua adalah **Insentif**, merupakan tambahan-tambahan gaji diatas atau diluar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program-program insentif disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, penjualan, keuntungan-keuntungan atau upaya-upaya pemangkasan biaya.

2.2.2 Keefektifan Sistem Pengendalian Internal

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional

melaksanakan pengawasan internal adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Kementerian negara adalah organisasi dalam Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas dalam bidang tertentu.

Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2.2.3 Penegakan Hukum

Menurut Faisal (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa *fraud* sebagai tindak pidana atau korupsi. Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada disuatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi

tidak mematuhi. Banyak hukum yang menjadi dasar mengenai pengelolaan keuangan daerah dan undang-undang maupun peraturan pemerintah yang melarang melakukan *fraud* bagi pegawai dan pejabat pemerintahan, dan banyak juga sanksi yang dikenakan kepada pelaku *fraud* diantaranya hukuman penjara dan denda uang, namun masih saja banyak kasus demi kasus yang terjadi sehingga dapat dilihat bahwa hukum seperti tidak memiliki kekuatan bagi pelaku *fraud*.

Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa *fraud* sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi. Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada di suatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhi. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan timbul bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi *fraud* di sektor pemerintahan.

Tujuan Hukum dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara umum, fungsi hukum

adalah mengatur tata kehidupan bermasyarakat agar dapat terciptanya suatu kerukunan, ketertiban, keadilan dan perdamaian, mengatur dan mengkoordinasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat agar tidak terjadi terbenturnya kepentingan yang berbeda dan melindungi segala kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya itu, misal kepentingan seseorang terhadap jiwanya, kehormatannya, harta bendanya dan sebagainya.

Fungsi Hukum menurut Soerjono Soekanto dalam Ali, 2009 mengatakan bahwa di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini berdasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan sesuatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Sebagai tata kaedah, fungsi hukum yaitu untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum seharusnya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai pengendalian sosial. Hal tersebut dapat diartikan bahwa hukum menjadi arah bagi masyarakat memperoleh kesejahteraan karena hak-hak masyarakat di kelola oleh pemerintah dimana pemerintah juga memiliki tujuan agar masyarakat memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik.

2.2.4 Perilaku Tidak Etis

Etis merupakan asas perilaku yang disepakati atau perilaku yang dilakukan secara umum biasanya mengenai hal-hal seperti moral, sesuatu yang benar dan bermartabat. Zulkarnain (2013) mengatakan bahwa perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti, yang jawabannya bergantung pada interaksi

yang kompleks antara situasi serta karakteristik pribadi pelakunya. Sehingga disimpulkan bahwa budaya etis dalam fraud adalah tradisi atau cara yang dianggap benar oleh pelaku fraud karena dianggap umum atau hal yang wajar dilakukan karena dilihat bahwa kasus *fraud* selalu terjadi dari tahun ke tahun dan menurut Mustikasari (2013) mengatakan bahwa budaya etis dapat diproksikan dengan rasionalisasi.

Budaya organisasi pada intinya merupakan sebuah sistem dari nilai-nilai yang bersifat umum. Adapun nilai-nilai personal mulai dikembangkan pada saat awal kehidupan, seperti halnya kepercayaan pada umumnya, tersusun dalam sistem hirarki dengan sifat-sifat yang dapat dijelaskan dan diukur, serta konsekuensi-konsekuensi perilaku yang dapat diamati (Douglas et.al, 2001) dalam Syaikhul Fallah (2006).

2.2.5 Asimetri Informasi

Indriani (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa perkembangan informasi berlangsung sangat cepat dalam era globalisasi, begitu juga kondisi lingkungan ekonomi yang berhubungan erat dengan bisnis yang terus mengalami perubahan membutuhkan informasi antara lain adalah informasi yang diperoleh dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan memiliki kelemahan tertentu, sekalipun pembuatan laporan keuangan diatur oleh suatu standar yang telah ditetapkan, namun perlu disadari bahwa laporan keuangan mengandung banyak asumsi, penilaian, serta pemilihan metode perhitungan yang dapat digunakan oleh pembuatnya. Adanya pemilihan kebijakan akuntansi dalam

standar yang dapat digunakan tersebut membuat manajemen memiliki cukup keleluasaan untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut.

Menurut Wilopo (2006) asimetri informasi adalah situasi dimana terjadi ketidaksiharasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi.

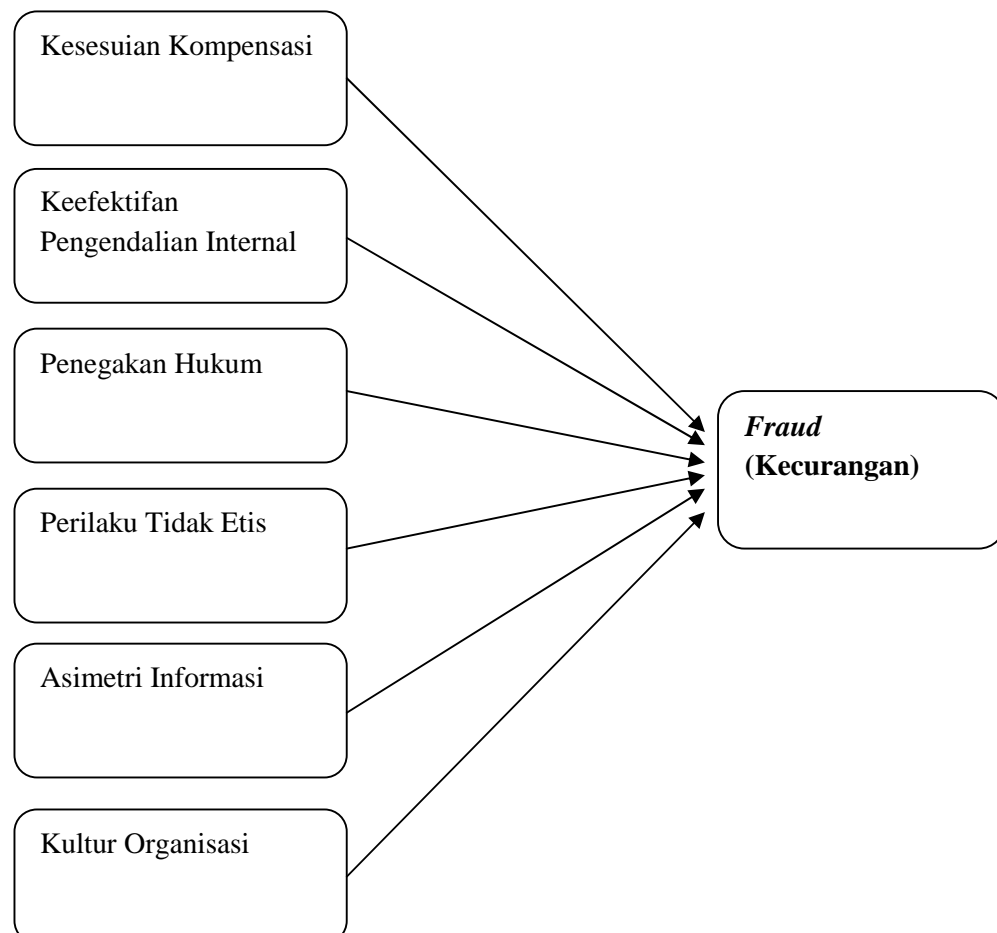
Teori agensi juga mengimplikasikan terjadinya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dengan pemilik yang dalam hal ini merupakan pemegang saham/investor, dimana manajemen memiliki informasi lebih banyak dan akurat daripada pemegang saham akan cenderung ingin menyampaikan kondisi perusahaan yang baik, walaupun terkadang realitanya kurang mendukung. Oleh sebab itu informasi yang transparan sangat dibutuhkan pengguna informasi terutama pemegang saham sebagai pemilik, dimana informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusannya (Indriani, 2013). Dalam hal ini *agent*/manajemen dalam pemerintahan adalah pihak intern instansi terkait.

2.2.6 Kultur Organisasi

Zulkarnain (2013) mengatakan bahwa kultur organisasi merupakan nilai, norma dan konsep dasar yang dianut oleh anggota organisasi yang mempengaruhi perilaku dan cara kerja anggota organisasi. Budaya organisasi bisa diartikan sebagai kebiasaan, tradisi dan cara umum dalam melakukan segala sesuatu yang ada di sebuah organisasi saat ini merupakan hasil atau akibat dari yang telah dilakukan sebelumnya dan seberapa besar kesuksesan yang telah diraihinya pada masa lalu. Terbentuknya kultur organisasi menurut Robbins (2002:262) yakni

berawal dari filsafat pendiri organisasi (mereka mempunyai visi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu), budaya asli diturunkan dari filsafat pendirinya, yang kemudian berpengaruh terhadap kriteria yang digunakan dalam mempekerjakan anggota/karyawannya. Tindakan manajemen puncak juga mempunyai dampak besar dalam pembentukan budaya organisasi (melalui apa yang mereka katakan dan lakukan) dan seringkali menentukan iklim umum dari perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat. Dapat disimpulkan bahwa di suatu lingkungan yang mempunyai kultur organisasi yang baik, pegawai akan lebih cenderung menjalankan peraturan-peraturan instansi dan menghindari perbuatan *fraud*. Jika terdapat budaya organisasi yang tidak baik maka akan mendorong pegawainya untuk melakukan tindakan *fraud* sesuai kultur organisasi dalam instansi tersebut.

2.3 Rerangka Pemikiran



Gambar 2. Rerangka pemikiran teoretis

2.4 Pengembangan Hipotesis dan Penelitian Terdahulu

2.4.1 Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap *Fraud*

Wilopo (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kesesuaian Kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan kepuasan kompensasi juga tidak berpengaruh terhadap persepsi aparat pemerintah daerah tentang tindak pidana korupsi. Hasil analisis ini tidak mendukung teori yang ada, bahwa seseorang yang terpuaskan kompensasinya tidak akan melakukan reaksi kompromistis dalam bentuk tindakan korupsi. Jensen and Meckling (1976) menjelaskan dalam teori keagenan bahwa pemberian kompensasi yang memadai ini membuat agen (manajemen) bertindak sesuai dengan keinginan dari prinsipal, yaitu dengan memberikan informasi sebenarnya tentang keadaan perusahaan. Pemberian kompensasi ini diharapkan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi karena kompensasi merupakan komponen biaya yang dibayarkan oleh organisasi pada karyawan. Bagi karyawan kompensasi merupakan faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan, sedang bagi organisasi kompensasi merupakan komponen biaya yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan profitabilitas (Thoyibatun, 2009). Berbeda dengan penelitian oleh Thoyibatun (2009) yang menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dan hal tersebut didukung dengan adanya penelitian Adiputra (2015) yang menyatakan

bahwa Kesesuaian Kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud*. Berdasarkan teori tersebut dan penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kesesuaian Kompensasi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *Fraud*

2.4.2 Keefektifan Sistem Pengendalian Internal terhadap *Fraud*

Pengendalian Internal merupakan kebijakan atau prosedur yang dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan-tujuan perusahaan dapat dicapai dan untuk mengurangi kerugian atas kemungkinan terjadinya ancaman keamanan dalam informasi. Pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personellainentitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum peraturanyang berlaku. Di dalam *fraud diamond* terdapat komponen opportunity/ peluang yang menyatakan bahwa peluang terjadinya fraud dapat di minimalkan oleh dengan memperkuat pengendalian internal.

Penelitian yang dilakukan oleh Adiputra (2015) menunjukkan bahwa keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud*, hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah tentang sistem pengendalian internal yang dapat meminimalkan *fraud* apabila dijalankan secara efektif. Hasil tersebut juga didukung dengan penelitian Mustikasari (2013) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal juga berpengaruh signifikan negatif terhadap *fraud*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang terkait dengan keefektifan

pengendalian internal dan pengaruhnya terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₂: Keefektifan sistem pengendalian internal secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *Fraud*

2.4.3 Penegakan hukum terhadap *fraud*

Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada di suatu negara.

Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuinya. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan timbul bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi *fraud* di sektor pemerintahan sesuai dengan penelitian Najahningrum (2013) yang mendukung hal tersebut bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Zulkarnain (2013) bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan artinya para pegawai instansi pemerintahan merasa para pejabat cepat tanggap dalam menangani pelanggaran peraturan instansi, keputusan kepala instansi juga memutuskan hukuman pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka dengan hal tersebut, hipotesis yang dapat di tarik adalah, sbb:

H₃: Penegakan hukum secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

2.4.4 Perilaku Tidak Etis Terhadap *fraud*

Salah satu faktor yang mempengaruhi *Fraud* di sektor pemerintahan adalah perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan, perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan, perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi, serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Hasil penelitian Wilopo (2006) menyatakan bahwa perilaku tidak etis memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan. Sebagaimana sudah dibahas bahwa budaya etis merupakan kebiasaan yang sudah ditinggalkan dari masa lalu, dalam hal ini kebiasaan melakukan fraud merasa atau menganggap melakukan fraud merupakan hal yang etis dan didasari dengan perilaku tidak etis maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi budaya etis (menganggap fraud adalah hal benar), maka semakin tinggi pelaku fraud dalam organisasi tersebut. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2013) yang menyatakan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* artinya semakin baik budaya yang diterapkan maka akan mengurangi fraud di sektor pemerintahan, sesuai dengan pernyataan Zulkarnain (2013) menganggap perilaku tidak etis dipengaruhi dengan budaya organisasi sehingga perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap *fraud*.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diturunkan menjadi hipotesis, sbb:

H₄: Perilaku tidak etis secara signifikan berpengaruh positif terhadap *fraud*

2.4.5 Asimetri Informasi terhadap *fraud*

Wilopo (2006) sebagaimana dikutip dari Scott (2003:7-8) mengatakan bahwa asimetri informasi adalah situasi dimana terjadi ketidakselarasan informasi antara

pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Asimetri informasi ini membuat manajemen memanfaatkan ketidakselarasan informasi untuk keuntungan mereka serta sekaligus merugikan pihak luar perusahaan, seperti membiarkan informasi yang terkait dengan investor dan teori tersebut didukung dengan penelitian Mustikasari (2013) bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *fraud*, artinya jika terjadi asimetri informasi dapat menyebabkan terjadinya *fraud*. Semakin didukung dengan penelitian yang dilakukan Najahningrum (2013) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *fraud* artinya semakin tinggi asimetri informasi maka akan semakin meningkatkan peluang terjadinya *fraud*. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diturunkan menjadi hipotesis, sbb:

H₅: Asimetri Informasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap *fraud*

2.4.6 Kultur Organisasi terhadap *fraud*

Sulistiyowati (2007) dalam penelitian Zulkarnain (2013) Kultur organisasi berpengaruh terhadap persepsi aparat pemerintah daerah tentang tindak korupsi, bahwa kultur organisasi yang baik tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan korupsi, karena kultur organisasi yang baik akan membentuk para pelaku organisasi mempunyai *sense of belonging* (rasa ikut memiliki) dan *sense of identity* (rasa bangga sebagai bagian dari suatu organisasi). Sebagaimana sudah dibahas bahwa kultur organisasi merupakan nilai, norma, dan konsep dasar yang dianut oleh anggota organisasi yang

mempengaruhi perilaku dan cara kerja anggota organisasi (Zulkarnain, 2013). Kultur organisasi juga dapat didasari dengan komitmen organisasi seperti yang diungkapkan oleh Mustikasari (2013) bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang terkait dengan budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap *fraud*, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₆ : Kultur Organisasi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *fraud*

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan kausatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa atau kejadian variabel-variabel yang diteliti, dan juga untuk menemukan ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, ketika data yang digunakan dalam bentuk angka. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner.

3.2 Sampel

Data dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Data dalam penelitian ini adalah pegawai dan pejabat yang berada di bagian tata usaha keuangan yang meliputi pengelolaan anggaran, pengadaan, bendahara, pengelolaan aset dan pelaporan di Pemerintahan kota Bandar Lampung. Menurut hasil survei *Indonesia Corruption Watch*(2014), Pemerintahan Daerah menduduki posisi paling tinggi dalam kategori korupsi berdasarkan instansi diantaranya Provinsi Lampung, pejabat/pegawai Pemda adalah kategori korupsi paling tinggi berdasarkan jabatan tersangka, selain itu *mark up*, laporan fiktif, penggelapan dan penyalahgunaan anggaran adalah kategori korupsi paling tinggi berdasarkan modus.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara *purposive sampling* yakni seluruh SKPD kota Bandar Lampung dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

1. Pegawai atau pejabat yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kota Bandar Lampung.
2. Pegawai atau pejabat yang bertanggung jawab pengelolaan anggaran, pengadaan, bendahara, pengelolaan aset dan pelaporan
3. Pegawai atau pejabat yang mengembalikan lembar kuesioner sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
4. Pegawai atau pejabat yang mengisi semua pernyataan yang sudah diajukan dengan lengkap.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut (Sugiyono, 2013), Sehingga data sudah dianggap mewakili SKPD kota Bandar Lampung dan memenuhi kriteria *sampling*. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Kuesioner disebarkan secara langsung pada responden melalui wakil yang ditunjuk dalam penyebaran kuesioner dan responden diharapkan mengembalikan kuesioner ini kepada peneliti dalam waktu yang ditentukan.

Penelitian ini menggunakan data primer, objek dalam penelitian ini adalah pegawai dan pejabat yang berada di bagian tata usaha keuangan yang meliputi pengelolaan anggaran, pengadaan, bendahara, pengelolaan aset dan pelaporan di

Pemerintahan kota Bandar Lampung. Tahap pertama melakukan *pilot test* di Dinas Pendapatan dan memperoleh masukan serta saran agar kuesioner bisa dipahami dan sesuai dengan kondisi di pemerintahan daerah. Tahap kedua setelah *pilot test* valid dan reliabel adalah menyebarkan terlebih dahulu surat izin penelitian dan melakukan konfirmasi kembali untuk memperoleh izin penyebaran kuesioner. Dari seluruh SKPD kota Bandar Lampung yang berjumlah 30 instansi, hanya 14 instansi yang memperoleh izin untuk melakukan penyebaran kuesioner. Hal ini disebabkan karena waktu yang diberikan hanya 30 hari kerja sehingga tidak dapat memaksimalkan untuk memperoleh izin penyebaran kuesioner. Berikut daftar SKPD kota Bandar Lampung yang memperoleh izin untuk melakukan penyebaran kuesioner:

Tabel 4. Daftar Penyebaran Kuesioner

No	SKPD	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	8
2	Badan Pemberdayaan masyarakat & pemerintahan Kelurahan	9	9
3	Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah	13	12
4	Badan Kepegawaian Daerah	9	9
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	35	32
6	Badan Satuan Polisi Pamong Praja	7	6
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	9
8	Dinas Tata Kota	10	9
9	Dinas Pendapatan Daerah	12	12
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	9	9

No	SKPD	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali
11	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	7	6
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9	8
13	Dinas Sosial	7	7
14	Dinas Tenaga Kerja	7	7
	Total	151	143

Tabel 5. Penyebaran dan Pengembalian kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	%
1	Jumlah kuesioner yang disebar	151	100%
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	(8)	5%
	Jumlah kuesioner yang kembali	143	95%
	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	8	6%
	Jumlah kuesioner yang dapat diolah & dianalisis	135	94%

Jumlah kuesioner yang disebar adalah 151 eksemplar, penyebaran kuesioner dengan cara mendatangi SKPD yang dimaksud untuk memberikan kuesioner langsung kepada para responden melalui perwakilan yang ditunjuk di lingkungan instansi. Kuesioner dikembalikan dalam beberapa hari sesuai kesepakatan dengan responden. Ada juga sebagian kuesioner yang penulis sebar dengan cara kolektif kepada satu orang yang penulis kenal dan percaya pada SKPD yang dituju, lalu penulis ambil kembali setelah terisi. Dari 151 kuesioner tersebar, yang kembali 143 kuesioner. Dari 143 kuesioner yang kembali, 135 kuesioner dapat diolah dan sisa nya 8 kuesioner tidak dapat diolah karena data yang terisi tidak lengkap atau terisi lebih dari satu pilihan

Responden diminta untuk menjawab pertanyaan kuesioner dengan skala likert yang terdiri atas dua bagian, bagian pertama terkait dengan profil dan identitas responden dan bagian kedua berupa daftar pertanyaan sesuai dengan kondisi dan pengalaman terkait sikap, norma subjektif, kendali perilaku yang dirasakan, dan niat melakukan *fraud* sesuai dengan dimensi yang dibuat.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat mendeteksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Fraud*.

3.4.2. Variabel Independen

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen yang mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel independen lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, penegakan hukum, perilaku tidak etis, asimetri informasi, dan kultur organisasi.

3.5 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert 1-5 untuk mengukur Kesesuaian Kompensasi, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Penegakan Hukum, Perilaku Tidak Etis, Asimetri Informasi, dan Kultur Organisasi dengan menggunakan indikator-indikator yang menjadi tolak ukur

untuk menjadi sebuah instrumen pertanyaan. Dimensi yang menjadi indikator setiap variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Daftar ukuran variabel dan indikatornya

No	The Fraud Diamond Theory	Variable	Definsi Operasional Variable	Indikator	Butir Pernyataan
1	<i>Incentive</i>	Kesesuaian kompensasi	Persepsi pegawai tentang kesesuaian imbalan atau gaji dengan pekerjaan yang mereka lakukan, dan indikator tentang kesesuaian kompensasi ini dikembangkan oleh Gibson (1997:182-185) dalam Wilopo (2006)	1. Kompensasi keuangan 2. Pengakuan perusahaan atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan 3. Promosi 4. Penyelesaian Tugas 5. Pencapaian sasaran 6. Pengembangan Pribadi	1-6
2	<i>Opportunity</i>	Keefektifan Sistem Pengendalian Internal	Persepsi pegawai tentang keefektifan proses yang diterapkan dan dijalankan dalam instansi dan indikator dari variabel ini dikembangkan oleh Peneliti IAI (2001) dalam Wilopo (2006)	1. Penerapan wewenang dan tanggung jawab 2. Pencatatan transaksi 3. Pengendalian fisik 4. Sistem Akuntansi 5. Pemantauan dan evaluasi	7-11
3	<i>Opportunity</i>	Penegakan Hukum	Menurut wilopo (2008) dalam Mustikasari (2013) Penegakan hukum merupakan suatu tindakan nyata oleh subjek hukum terhadap hukum yang berlaku di suatu negara.	1. Peraturan Organisasi 2. Disiplin Kerja 3. Pelaksanaan tugas 4. Tanggung jawab	12-15
4	<i>Rationalization</i>	Perilaku tidak etis	Persepsi pegawai tentang tindakan, pola tingkah laku, dan kepercayaan yang telah menjadi suatu panutan bagi seluruh pegawai yang berada didalam instansi. Robinson (1995) & Tang <i>et al.</i> (200) dalam Wilopo (2006)	1. Perilaku manajemen yang menyalahgunakan kedudukan (<i>Abuse position</i>) 2. Perilaku manajemen yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (<i>abuse resources</i>) 3. Perilaku manajemen yang menyalahgunakan kekuasaan (<i>abuse power</i>) 4. Perilaku manajemen yang tidak berbuat apa-apa (<i>no action</i>)	16-19
5	<i>Rationalization</i>	Kultur Organisasi	Persepsi pegawai tentang pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan dan dikembangkan oleh kelompok tertentu dan indikator ini dikembangkan oleh Robbins (1990) dalam Brahmastari dan Suprayetno (2008)	1. Nilai-nilai organisasi 2. Dukungan manajemen 3. Sistem imbalan 4. Toleransi dalam berbagi kesalahan sebagai peluang untuk belajar 5. Orientasi pada rincian pekerjaan 6. Orientasi pada tim	23-28
6	<i>Capability</i>	Asimetri Informasi	Persepsi pegawai tentang ketidaksesuaian informasi yang dimiliki oleh pihak principal dan agent dan indikator ini dikembangkan oleh dunk (1993) dalam Wilopo (2006)	1. Situasi ketika manajemen lebih mengenal hubungan input-output 2. Situasi ketika manajemen lebih mengenal teknis pekerjaan 3. Situasi ketika manajemen lebih mengetahui pengaruh faktor eksternal	20-22
7		Fraud	Menurut IAI (2001) dalam Mustikasari (2013) dalam fraud secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.	1. Kecurangan Laporan Keuangan 2. Penyalahgunaan asset 3. Korupsi	29-31

Dalam penelitian ini menggunakan teori *fraud diamond* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Abdullahi dan Mansor (2015) bahwa *tindak* kecurangan didasari 4 faktor yakni *rationalization*, *Opportunity*, *pressure* dan *Capabilty*. *Rationalization*/Pembenaran diprosikan oleh variabel perilaku tidak etis dan variabel kultur organisasi. *Opportunity*/peluang diprosikan oleh variabel penegakan hukum dan keefektifan sistem pengendalian internal. *Pressure* diprosikan oleh variabel kesesuaian kompensasi. *Capabilty*/kemampuan diprosikan oleh variabel asimetri informasi.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang di adopsi dari Wilopo (2006). Dalam penelitian Wilopo (2006) angket yang disebar ditujukan kepada manager BUMN dan variabel penelitiannya dimoderasi oleh perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sehingga dimensi yang digunakan berbeda dengan variabel penelitian ini. Dalam penelitian ini hanya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* termasuk perilaku tidak etis sebagai variabel independen. Angket yang disebar ditujukan kepada pegawai SKPD yang bersatus PNS sehingga membutuhkan *pilot test* terlebih dahulu untuk menyesuaikan kuesioner terhadap sampel. Angket digunakan yakni kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, penegakan hukum, perilaku tidak etis, asimetri informasi, dan kultur organisasi. Kuesioner yang sudah disebutkan terdiri dari pernyataan-pernyataan dengan diberi penjelasan untuk setiap pernyataan agar mempermudah responden dalam menjawab. Kuisisioner dalam penelitian ini disusun menggunakan skala Likert. Penelitian ini menggunakan skala Likert 1-

5 dengan rincian sebagai berikut: (1) sangat tidak setuju (STS) sampai (5) sangat setuju (SS) yang akan diuji dengan menggunakan uji instrument yakni uji validitas dan uji reliabilita.

3.7 Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis menggunakan analisis full model *Struktural Equation Modeling* (SEM) dengan *smart PLS*. SEM adalah teknik statistik multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi (korelasi), yang bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antar indikator dengan konstraknya ataupun hubungan antara konstruk (Santoso, 2015). Dalam full model SEM juga dapat diartikan suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan variable laten dan indikatornya serta kesalahan pengukuran secara langsung. Alat analisis yang digunakan adalah aplikasi *smartPLS* versi 5.0. Metode analisis yang dilakukan antara lain statistik deskriptif, uji *outer* model, uji *inner* model dan uji hipotesis. Setelah model dibuat, dapat diidentifikasi dan dapat dianggap valid, pengujian dilanjutkan pada structural model untuk memperoleh sejumlah korelasi yang menunjukkan hubungan antar konstruk (Santoso, 2015)

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud*. Penelitian ini menggunakan data primer dan yang digunakan adalah pegawai dan pejabat Pemerintahan kota Bandar Lampung sebanyak 135 kuesioner yang dapat diolah dari 151 kuesioner yang disebar, 143 kuesioner yang kembali dan 8 kuesioner yang tidak dapat diolah. Dari hasil pengujian menggunakan metode SEM dan alat analisis *Smartpls*, menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*, keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud*, penegakan hukum berpengaruh positif terhadap *fraud*, perilaku tidak etis berpengaruh negatif terhadap *fraud*, asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap *fraud* dan kultur organisasi berpengaruh positif terhadap *fraud*.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktik di sektor Pemerintahan mengenai bagaimana mengurangi tingkat terjadinya *fraud*, dalam hal ini adalah kasus korupsi dengan mengkaji sistem kompensasi, mengefektifkan sistem pengendalian internal, meningkatkan dan lebih konsisten dalam penegakan

hukum, menciptakan perilaku etis dalam organisasi untuk meminimalkan perilaku tidak etis, mengurangi asimetri informasi untuk menghasilkan informasi yang transparan dan akuntabel serta menciptakan kultur organisasi yang baik.

5.3 Keterbatasan dan Saran

1. Penelitian ini murni dilakukan dengan metode survei dan belum dilengkapi dengan metode wawancara sehingga kemungkinan jawaban responden belum sepenuhnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Disarankan untuk penelitian selanjutnya ditambahkan metode wawancara dalam pengambilan data.
2. Responden dalam penelitian ini hanya sebatas kepala bagian saja belum sampai tingkat kepala dinas, sehingga belum menggambarkan sepenuhnya obyek-obyek pelaku *fraud* yang berdasarkan data lebih rentan melakukan *fraud* adalah para pejabat pemerintahan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan lebih spesifik lagi yakni kepala dinas.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kembali instrumen variabel kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi dan mengkaji kembali teori yang diproksikan terhadap variabel-variabel didalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi & Mansor. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. Universitas Sultan Zainal Abidin: *International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences*. Vol. 5 (4), pp. 38–45
- Adriyani, Susmita & Utaminingsih, Nanik Sri. (2015). Analisis Determinan Financial Statement melalui Pendekatan Fraud Triangle. Universitas Negeri Semarang: *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765
- Ali, Yunasril. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta.
- Astarani, Juanda & Angelita, Adelsi. (2014). Analisis Pengaruh Peranan Badan Pengawas, Aktivitas Pengendalian, dan Sistem Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi pada koperasi di Pontianak). *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*.
- Beawiharta, Innosanto & Rahayu, Sri. (2014). Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota dan Impelementasi Good Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2014
- Brahmasari, Ida Ayu & Suprayetno, Agus. (2008). Pengaruh Motivasi Kerja, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan serta Dampaknya pada Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Pei Hai International Wiratama Indonesia). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*
- Brazel, Joseph F. Jones, Keith L & Zimbelman, Mark F. (2009). Using Nonfinancial Measures to Assess Fraud Risk. *Journal of Accounting Research*
- Dunk, Alan S., (1993). The Effect of Budget Emphasis and Information Asymmetry on the Relation Between Budgetary Participation and Slack. *The Accounting Review* vol. 68 (April), pp: 400-410.
- Faisal, Muhammad. (2013). Analisis Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus. Universitas Negeri Semarang: *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765

- Falah, Syaikhul. (2006). Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika Terhadap Sensitivitas Etika (Studi Empiris Tentang Pemeriksaan Internal di Bawasda Pemda Papua). Tesis: Universitas Diponegoro
- Hair, J.F. et al. (2000). *Multivariate Data Analysis With Reading, Ed.4*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Hartono, J.M. (2008). *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hasibuan, H. Malayu S.P. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi Kedua*. Penerbit BPFE-UGM: Yogyakarta.
- Hogan, Chris E. Rezaee, Zabihollah. Riley, Richard A & Velury, Uma K. (2008). Financial Statement Fraud : Insights from the Academic Literature. *Auditing: A Journal of Practice & Theory. American Accounting Association*.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2014). Diakses di www.infokorupsi.com pada 11 Desember 2015 Pukul 20.00 WIB
- Indriani, Erna Wati. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi luas Pengungkapan Sukarela dan Implikasinya terhadap Asimetri Informasi. Universitas Negeri Semarang: *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (2001). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Irianto, Gugus. Novianti, Nurlita. Rosalina, Kristin & Firmanto, Yuki. (2009). Integrity, Unethical Behavior, and Tendency Of Fraud. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Jansen, Michael C & Meckling, William H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*
- Jogiyanto. (2011). *Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Jogiyanto, H,M. Dan Abdillah, Willy. (2014). *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk penelitian empiris*. BPFE Universitas Gajah Mada.
- Mustikasari. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. Universitas Negeri Semarang: *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765

- Najahningrum, Anik Fatun. (2013) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. Universitas Negeri Semarang: Accounting Analysis Journal. ISSN 2252-6765
- Opini Audit Provinsi Lampung. (2013). Diakses di www.bandarlampung.bpk.go.id pada 25 Oktober 2015 Pukul 19.00 WIB
- Pasaribu, Rowland B. Fernando. (2013). *Kewarganegaraan: Dampak Globalisasi dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara Bab 13 Hal.: 397*. Surakarta: Lentera Dipantara.
- Puspasari, Novita & Suwardi, Eko. (2012). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintahan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi 15.
- Rahmawati, Ardiana Peri. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi*. Pasal 2 ayat 1.
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*
- _____. *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi*
- Sanuri, Nilam. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas Manajemen terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada BUMN Kota Padang). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Sari, Yuniarta & Adiputra. (2015). Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi dan Impelementasi Good Governance terhadap Kecenderungan Fraud (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Tabanan). Universitas Pendidikan Ganesha

- Stalebrink, Odd J & Sacco, John F. (2006). Razionalization of Financial Statement Fraud in Government: An Austrian Perspective. *Critical Perspective on Accounting*
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta
- Tang, T. L. P. and Randy K. Chiu. (2003). Income, Money Etic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees? *Journal of Business Ethics*, 46, pp: 13-20.
- Thoyibatun, Siti. Sudarma, Made & Sukoharsono, Eko Ganis (2009). Analysing the Influence of Internal Control Compliance and Compensation System Against Unethical Behavior and Accounting Fraud Tendency (Studies at state University in East Java). *Simposium Nasional Akuntansi 12*
- Thoyibatun, Siti. (2009). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis Dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Urbach, N., & Ahlemann, F. (2010). Structural Equation Modeling in Information System Research Using Partial Least Square. *Journal of Information Technology Theory and Application*, 11 (2): 5-39
- Wilopo. (2006). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X. Padang*
- Zulkarnain, Rifqi Mirza. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Pada Dinas Kota Surakarta. *Universitas Negeri Semarang: Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765